

## PERANAN RADIO SIARAN DALAM STRATEGI KOMUNIKASI PEMBANGUNAN NASIONAL\*

Oleh Ashadi Siregar

( 1 )

Sejarah kehadiran radio swasta di Indonesia memang khas. Agaknya sejarahnya ini yang menyebabkan karakternya dipandang secara ambivalen. Di satu pihak dilihat hanya sebagai sarana hobby, di pihak lain sebagai institusi sosial. Sebagai sarana hobby, kehadirannya hanya untuk memenuhi fungsi psikologis bagi penggunanya, karenanya tidak perlu dibebani dengan fungsi sosial. Pengguna disini dari dua sisi, yaitu pengelola dan pendengar. Pengelola dan pendengar adalah para hobbyist, yang memuaskan dorongan-dorongan psikologis untuk memperoleh kesenangan. Karenanya pengelola disini dapat digolongkan sebagai amatir.

Sebaliknya sebagai institusi sosial, kehadirannya dilekati dengan fungsi yang harus dijalankannya dalam sistem sosial. Keberadaan dalam sistem sosial ini melahirkan pengelola sebagai aktor sosial yang harus menjalankan fungsinya sesuai dengan harapan (expectation) dari masyarakat. Harapan inilah yang menformat fungsi yang harus dijalankan oleh media massa sebagai institusi sosial. Ia dapat berupa dorongan psikologis, tetapi yang tak kalah pentingnya adalah dorongan sosiologis. Jika dorongan pertama membawa seseorang ke dunia dalam yang bersifat subyektif, maka dorongan kedua membawa seseorang ke dunia luar yang bersifat empiris obyektif.

( 2 )

Media massa akan mensuplai masyarakatnya untuk dapat memasuki dunia yang dipilihnya. Materi informasi fiksional semacam musik akan membawa penggunanya ke dunia subyektif, sedang materi faktual seperti berita (news) digunakan sebagai dasar memasuki dunia sosial empiris.

Pilihan seseorang akan informasi ditentukan oleh posisinya dalam sistem sosial. Seseorang yang memiliki peran dalam sistem sosial, semakin diperlukan materi informasi faktual. Semakin tidak berperan, semakin tidak diperlukan informasi faktual, sebab yang diperlukan hanya materi fiksional yang dapat menyenangkan secara psikologis.

Selain itu dorongan seseorang akan informasi bisa juga karena pembiasaan (conditioning) dari dinamika sosial di luar dirinya. Jika bertahun-tahun hanya memperoleh tipe informasi tertentu, maka kebutuhannya akan informasi akan terformat, seolah-olah hanya seperti yang biasa diterimanya. Atau peran sosial seseorang dapat dijalankan tanpa landasan dunia empiris obyektif. Kekuasaan yang determinan misalnya, bisa menyebabkan seseorang tidak memerlukan informasi faktual, sebab keputusan-keputusannya dapat dijalankan secara paksaan (coercion).

Dengan demikian keberadaan media massa sangat ditentukan oleh lingkungan sosiologis dari sistem sosialnya. Kehadiran radio swasta di Indonesia tak terlepas dari perubahan-perubahan dalam masyarakat. Embrio radio swasta mulai terasa terutama dari eksperimen elektronik dari kelompok-kelompok amatir. Baru pada awal Orde Baru, radio non pemerintah dimanfaatkan dalam fungsi sosial.

Tetapi secara umum, radio non-pemerintah tetap lebih banyak sebagai sarana hobby. Baru belakangan stasiun-stasiun ini diwajibkan dalam bentuk badan usaha resmi. Hanya saja

---

\* Disampaikan pada *Seminar Peranan Media Elektronik dalam Pembangunan Nasional*, Pengurus Pusat Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia, Jakarta 3 Juli 1996

ketentuan yuridis tidak otomatis akan mengubah konstelasi dalam sistem sosial, yang akan memformat radio siaran swasta sebagai media massa yang ideal.

( 3 )

Dalam memahami keberadaan radio siaran di Indonesia, dapat dimulai dengan melihat struktur peradioan yang ada sekarang. Ada dua macam struktur yang dapat dibicarakan. Pertama struktur institusional secara makro, yaitu entitas media atau stasiun-stasiun radio yang ada sebagai sebuah sistem. Kedua, struktur siaran pada masing-masing stasiun, yaitu sistem internal masing-masing stasiun (Browne 1989).

Struktur institusional makro sepenuhnya dikuasai oleh pemerintah, dengan jaringan (networks) peradioan yang dikendalikan oleh pemerintah. Dimulai dari jaringan RRI, ada kebijaksanaan yang bersifat sentral, dengan stasiun induk di Jakarta dan stasiun-stasiun regional dan lokal tersebar di seluruh Nusantara. Struktur tunggal ini tidak diimbangi oleh dunia swasta. Artinya, sampai saat ini belum ada networks stasiun-stasiun radio swasta yang benar-benar sebagai satuan struktur institusional di Indonesia.

Selain struktur yang bersifat tunggal dalam kendali pemerintah, isi siaran informasi faktual juga ditentukan secara sentralistik, yang melekat dari sifat sentralistik struktur institusi RRI tersebut. Akibatnya stasiun-stasiun radio swasta tidak dapat mengembangkan karakteristiknya yang khas sebagai media informasional (informasi yang membuat masyarakat "well-informed" akan lingkungannya). Dunia empiris masyarakat yang bersifat lokal tidak dapat dimanfaatkan oleh stasiun radio swasta sebagai informasi yang disajikan kepada khalayaknya. Stasiun radio swasta lebih banyak berfungsi sebagai stasiun relay dari stasiun induk yang bersifat sentral strukturnya. Akibat berantainya, umumnya radio swasta lebih berfungsi hiburan, dan media persuasi komersial, tidak dapat mengembangkan fungsi informasional. Padahal fungsi informasional ini diharapkan seimbang dengan fungsi hiburan dan persuasi komersial. Bahkan di kota besar, kebutuhan informasional ini sebenarnya lebih dirasakan lagi. Jika radio siaran swasta hanya dijadikan sebagai sumber hiburan, potensinya sebagai media massa tidak dapat dikembangkan sepenuhnya. Dan masyarakat sendiri, terutama di kota besar, yang motivasinya atas informasi faktual yang aktual sangat tinggi, tidak dapat dipenuhi oleh radio.

( 4 )

Dalam menjalankan fungsi informasionalnya, radio siaran membuat khalayak lebih terlibat dalam masalah aktual dan dekat lingkungan ("proximity"). Meskipun struktur sentralistik dapat mensuplai informasi yang bersifat nasional dan internasional, namun informasi yang memenuhi nilai proximity tetap sebagai prioritas bagi radio siaran. Semakin banyak radio siaran di satu kota yang dapat menyajikan secara khas dan orisinal informasi dengan nilai proximity ini, situasi lingkungan akan menjadi lebih terbuka dan jelas.

Tetapi dengan situasi sekarang, masyarakat hanya menjadikan sumber hiburan.

Kecenderungan ini tidak sehat bagi upaya membangun institusi komunikasi di Indonesia. Sebagai institusi media massa, radio siaran diharapkan dapat menjalankan fungsinya secara proporsional. Dalam kerangka yang sehat, seharusnya fungsi informasional dan hiburan yang seimbang. Jika masyarakat menempatkan satu radio siaran sebagai prioritas sumber hiburan, pengelola agaknya sudah perlu risau. Betapa pun besar jumlah khalayak yang bisa dijangkaunya, namun keberadaannya sebagai institusi media massa belum berhasil dibangun.

Dari berbagai konstataasi permasalahan makro dan mikro yang melingkupi radio siaran swasta, setidaknya dapat dipertimbangkan pokok-pokok pikiran berikut ini:

## 1. Regulasi

Regulasi disini berarti adanya dasar hukum bagi penyelenggaraan siaran elektronik. Dengan adanya dasar hukum ini sekaligus menjadi deregulasi atas kendala-kendala birokrasi, sehingga diharapkan:

- a. Ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan media massa elektronik umumnya, radio khususnya, tidak lagi semata-mata keputusan birokrasi.
- b. Swasta dapat menyelenggarakan usaha networks dan multi channel dalam siaran radio.
- c. Pengelola radio swasta dapat menyelenggarakan siaran informasi faktual dengan proses yang otonom.

## 2. Asosiasi

Perlunya meningkatkan peran asosiasi dengan kejelasan fungsinya, di antaranya:

- a. Sebagai asosiasi pengusaha perusahaan media radio, melakukan langkah-langkah strategis secara sosial dan politik agar media radio dapat berkembang menjadi institusi yang kuat dalam masyarakat.
- b. Sebagai asosiasi broadcaster radio yang dapat menjadi wadah bagi kaum profesional dalam mengembangkan standar profesionalisme agar memiliki kejelasan peran sosialnya dalam dunia komunikasi.

## 3. Profesionalisme

Profesionalisme disini akan menuntut:

- a. Standar kualifikasi bagi broadcaster radio swasta. Selama dunia pendidikan belum siap menjawab tantangan profesionalisme dalam peradioan swasta, pola magang yang dijalankan selama ini diharapkan dapat dikembangkan lebih bersistem dan terencana. Akan lebih baik jika asosiasi peradioan merumuskan sendiri kebutuhannya, dan merancang kurikulum yang sesuai dengan tantangan yang dihadapi di masa depan, untuk memberikan latihan-latihan profesi bagi para broadcaster dan pengelola perusahaan radio.
- b. Strategi manajemen dalam membangun format stasiun. Setiap perusahaan radio swasta diharapkan dapat merumuskan dan membangun format stasiunnya. Pada tahap awal, asosiasi peradioan diharapkan dapat menggerakkan satuan tugas untuk membantu stasiun yang memerlukan konsultasi pengembangan manajemen dan format stasiunnya.

Dengan konstataasi dan pokok pikiran ini, dapatlah dibayangkan bahwa masalah yang kita hadapi bukan hanya urusan radiowan swasta, tetapi juga unsur-unsur dalam masyarakat. DPR misalnya, merupakan jalur bagi terwujudnya Undang-Undang Siaran (Broadcasting Law). Tentunya jangan sampai terjadi undang-undang yang malah menjerat leher, karena disusun secara "gelap" dan tergesa-gesa.